**PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS
(Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Kudus)**

Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati

Email : muss01sh@gmail.com, hidayatullah@umk.ac.id, henny.susilowati@umk.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus)” bertujuan mengetahui proses peradilan pidana dan hambatan yang dihadapi terhadap anak pelaku tindak pidana seksual pada kasus yang diteliti, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian peradilan pidana pada kasus yang diteliti, dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti terdapat pada tingkat Kepolisian dan Bapas, sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan.

Kata Kunci: Peradilan Pidana, Anak, Tindak Pidana Seksual

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Jika berbicara tentang hukum, maka pikiran kita akan langsung menuju kepada undang-undang, perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Padahal sebenarnya, hukum mempunyai banyak aspek yang terdiri jauh lebih banyak komponen atau unsur yang lain, seperti misalnya filsafat hukum, sumber hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya.¹

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.² Adanya perbedaan sanksi pidana bagi orang dewasa dan anak berdampak pada adanya hak anak yang istimewa atau memiliki kekhususan tersendiri. Peraturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat dengan SPPA. Anak sebagai pelaku tindak pidana (*offender*) memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggulangi tindak pidana dan terhubung dengan peraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan berbagai lembaga dan perangkat hukum. Dalam SPPA telah ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya, mulai saat penyidikan sampai proses perkara anak pada sidang pengadilan. Mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, misalnya dalam pemeriksaan tempat pemeriksaan anak dipisahkan dengan tempat pemeriksaan dewasa, adanya pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan dewasa.³

Penyelesaian perkara tindak pidana anak pada tingkat pengadilan di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 terdapat 10 perkara pidana anak.⁴ Dari 10 perkara tersebut 3 diantaranya adalah tentang perlindungan anak. Salah satu contoh adalah perkara nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds atas nama AW. AW dikenakan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 38.

² Yuliesna Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 60.

³ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 38.

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kudus, "*Daftar Perkara Pidana Anak*", <http://sipp.pn-kudus.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2018 pukul 05.38 WIB.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hal pembuktian adalah hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana. Dari kasus di atas, AW mengaku jika tidak melakukan persetubuhan dengan korban (SM), namun korban mengaku jika telah disetubuhi oleh pelaku sebanyak 7 kali. Dari hal tersebut, sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/ atau pendamping untuk memgemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tersebut pula, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual, dengan judul penelitian “PERADILAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS (Kajian Atas Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kds)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses peradilan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual pada kasus yang diteliti ?

2. Bagaimana hambatan–hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti ?

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus) menggunakan yuridis sosiologis karena di dalam permasalahan yang ada dibahas dengan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan atau dikaitkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Teknik pengumpulan sampel dengan *purposive sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan *snowball sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Mengingat penelitian ini adalah yuridis sosiologis, maka pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah atau diproses dengan memeriksa, meneliti data apakah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan serta data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain dengan masalah yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti kemudian dirangkai dalam rangkaian kalimat yang tersusun sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Pada Kasus Yang Diteliti

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan khususnya penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵ Pada kasus yang diteliti mengenai tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak AW, polisi setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban SM, kemudian polisi membuat laporan. Menurut Kanit PPA Polres Kudus, anak pelaku AW dikenakan dalam Pasal 81 juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam proses pemeriksaan oleh Kanit PPA Polres Kudus anak pelaku didampingi oleh wali, Bapas dan Advokat.⁶

Kasus Posisi : Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB anak Pelapor (SM, Kudus/ 25 Maret 2009) bercerita kepada Pelapor bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WIB/ ketika korban selesai sholat magrib di Musholla Dk. Ngablak Ds. Tanjung Rejo Kec. Jekulo Kudus diajak bermain sepeda oleh Terlapor sesampai di tumpukan pasir samping rumah kosong milik Ibu Trihandayani/ pinggir sungai turut Dk. Ngablak Ds.

Tanjung Rejo Kec. Jekulo Kudus korban dipaksa untuk melepas celana kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) sebanyak satu kali, usai melakukan hubungan badan korban diantar pulang oleh Terlapor. Menurut keterangan korban, pelaku sudah 6 (enam) kali memaksa dan melakukan hubungan badan di waktu dan lokasi yang berlainan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 dan hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 korban diajak Pelapor untuk memeriksa ke RSUD Kudus, kemudian Pelapor/ Ibu Korban melaporkan ke Polres Kudus.

Analisa Kasus : Anak Pelaku dikenakan Pasal 81 juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam melakukan penyidikan, Kanit PPA Polres Kudus wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pati dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku AW.

Bapas Pati memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi penyidik anak. Bahwa melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku AW dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman sanksi pidananya di atas 7 (tujuh) tahun maka kasus anak pelaku tindak pidana seksual oleh AW dapat dilanjutkan pada tingkat di atasnya yaitu di kejaksaan karena mengingat dalam syarat diversi salah satunya ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun.⁷

⁵Liza Agnesta Kresna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta, 2018, hlm. 106.

⁶Fristianingsih, "Wawancara Pribadi", Kanit PPA, 11 Februari 2018, Polres Kudus.

⁷Fajar, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Anak, 25 Februari 2018, Bapas Pati.

Selain itu, Bapas Pati juga memberikan pertimbangan rekomendasi bahwa anak pelaku AW mendapatkan tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang.⁸ Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hasil penelitian oleh Bapas wajib diberikan kepada penyidik paling lama 3x24 jam setelah adanya permintaan penyidik diterima.

Penyidik wajib mengupayakan diversi, namun berdasarkan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak pelaku AW di atas 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal ini diversi gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari diversi yang terdapat dalam Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam hal ini penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan kasus anak AW ke penuntut umum.⁹ Sebelum penyidik menyerahkan kasus ke penuntut umum, maka penyidik harus melengkapi berkas perkara terlebih dahulu yaitu pertama penyerahan berkas perkara dan dalam hal sudah dinyatakan selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas anak pelaku tindak pidana seksual dan barang buktinya kepada penuntut umum.

b. Penuntutan Oleh Kejaksaan

Kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku AW, jaksa penuntut umum anak membuat surat dakwaan alternatif.

Pertama : Anak Pelaku dikenakan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau;

Kedua: Anak Pelaku dikenakan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. **Analisis Surat Dakwaan :**

Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum anak terhadap anak pelaku AW adalah surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Surat dakwaan adalah suatu surat atau yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bilamana cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹⁰

Berdasarkan surat dakwaan di atas, penuntut umum anak terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pelaku AW dari hal tersebut di atas jaksa memberikan penuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AW bin S bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

⁸Fajar, “Wawancara Pribadi”, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, 25 Februari 2018, Bapas Pati.

⁹Fristianingsih, “Wawancara Pribadi”, Kanit PPA, 11 Februari 2018, Polres Kudus.

¹⁰A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972, hlm. 75.

2. Mengenakan tindakan terhadap anak AW bin S berupa perawatan di LPKS (Lemaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SM binti DC.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa penuntutan Jaksa: Penuntutan oleh Jaksa penuntut umum perihal perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku AW dalam penuntutannya, jaksa menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum Anak memberikan sanksi berupa sanksi tindakan mengingat umur anak pelaku AW yang belum berusia 14 tahun. Berdasarkan Pasal 69 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai sanksi tindakan. Selain itu pun Jaksa Penuntut Umum Anak juga menggunakan saran dari Bapas mengenai tempat pelaksanaan sanksi tindakan yaitu di LPKS (Lemaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang. Jaksa

Penuntut Umum Anak juga menyertakan barang bukti pakaian anak korban SM yang digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian di persidangan.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tata cara pemeriksaan perkara anak dalam praktik peradilan pidana berdasarkan wawancara dengan hakim anak adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hakim anak membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum.
2. Orang tua/wali pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan dipanggil masuk di persidangan untuk mendampingi anak.
3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi dapat dilakukan dengan kehadiran atau tanpa kehadiran anak pelaku.
6. Sidang dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar sidang pengadilan.
7. Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/ atau Pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
8. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan Hakim untuk

¹¹ Maria Rina Sulistiawati, “Wawancara Pribadi”, Hakim Anak, 27 Februari 2018, Pengadilan Negeri Kudus.

menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

9. Hakim Anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.
10. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

Putusan Hakim terhadap Anak AW adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AW bin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak AW bin S oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lemaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban SM binti DC.

4. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa Praktik Peradilan Pidana

Anak: Berdasarkan wawancara dengan Hakim Anak Maria Rina Sulistiawati dalam praktik peradilan pidana anak sudah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam memeriksa perkara anak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sidang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali dalam pembacaan putusan. Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP hakim dalam menjatuhkan pidana setidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa hakim pun saling menghubungkan alat bukti tersebut. Keterangan saksi dapat diperoleh dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi. Pada keterangan ahli, hakim mengacu pada keterangan saksi ahli dr. Anurudha Budi S, SP. OG. Perihal surat, hakim berdasarkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang dibuat oleh Dokter Anurudha Budi S., Sp, OG pada tanggal 15 November 2016 yang telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban SM. Sedangkan pada keterangan terdakwa hakim berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh Anak AW.

Berdasarkan alat bukti yang ada dan melihat fakta hukumnya, hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama kepada Anak AW. Dakwaan

alternatif pertama Anak AW dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena anak terbukti bersalah, maka anak harus bertanggung jawabkan perbuatannya. Anak dalam bertanggung jawabkan perbuatannya dalam Pasal 69 angka (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Pidana Pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 angka (1) sampai dengan angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahannya terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pada Kasus Anak AW melihat umur anak yang masih dibawah 14 tahun maka berdasarkan Pasal 69 angka (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak yang belum berusia 14 tahun dikenakan tindakan. Dalam putusan hakim mengenai kasus Anak AW hakim memberikan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lemaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

d. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti

Kendala yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum mengenai peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Kudus (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus) terdapat hambatan dari pihak Kepolisian dan Bapas. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan didalamnya. Hambatan dari Pihak Kepolisian dan Bapas adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak Kepolisian¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait di kantor PPA Polres Kudus yang diwakili oleh Bapak Agus terhadap peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Kudus salah satu hambatannya adalah proses saat penyidikan, dimana saat penyidikan Anak Pelaku atau pun Anak Korban dalam diajak berinteraksi sulit, Anak Pelaku atau pun Anak Korban kebanyakan diam saat diajak berbicara. Karena diamnya anak saat diajak berinteraksi saat proses penyidikan ini mengakibatkan penyidik anak mengalami hambatan dalam pembuatan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).

Selain itu, bahwa dalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Anak Pelaku AW saat dikirim di Kejaksaan di kembalikan, karena pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak Pelaku didampingi oleh saudaranya, bukan orang tua atau wali dari Anak Pelaku, sehingga dengan hal

¹² Agus Siswanto, "Wawancara Pribadi", Kanit PPA, 21 Februari 2018, Polres Kudus.

tersebut Penyidik Anak menghadirkan orang tua Anak Pelaku dalam membenahi Berita Acara Pemeriksaannya kembali. Ada juga kendala lainnya yaitu sempitnya ruangan di Kanit PPA Polres Kudus. Mengingat proses penyidikan Anak tidak hanya melibatkan Penyidik Anak, melainkan lembaga lainnya juga yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (Dinsos) dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan pendapat narasumber di atas, penulis berpendapat bahwa dalam proses penyidikan memang tidak mudah dalam menangani kasus anak karena melihat psikologisnya masih anak-anak. Selain itu dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan memang harusnya orang tua yang mendampingi Anak, bukan saudara atau yang lainnya, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak orang tua terdapat peran didalamnya yaitu ikut mendampingi proses Anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Dari pihak Bapas¹³

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Anak di Bapas Pati, kendala yang dijumpai adalah waktu yang ditentukan dalam pembuatan Laporan Pemasyarakatan (Litmas) sangat pendek sekali yaitu 3x24 jam. Sedangkan dari pihak Bapas sendiri kurangnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang ada di Bapas Pati.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, penulis sependapat dengan pendapat dari Bapas bahwa waktu dalam proses pembuatan Laporan

Pemasyarakatan (Litmas) memang sangat singkat sekali. Berdasarkan hal tersebut, para penegak hukum memang harus lebih cepat proses dalam menangani kasus anak di banding dengan kasus dewasa, mengingat harus melihat kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada Bab IV, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Pada Kasus yang diteliti

a. Penyidikan di Kepolisian

Proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana seksual sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik tidak melakukan Diversi namun adanya syarat diversi yang tidak terpenuhi yaitu ancaman pidana anak yang daiatas 7 (tujuh) tahun, maka penyidik melanjutkan proses perkara ke tingkat selanjutnya yaitu ke Kejaksaan.

b. Penuntutan Oleh Kejaksaan

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang ada di KUHAP. Jaksa membuat surat dakwaan alternatif terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak AW. Dalam dakwaan primer anak AW di kenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam dakwaan subsider dikenakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Fajar, "Wawancara Pribadi", Pembimbing Kemasyarakatan Anak, 25 Februari 2018, Bapas Pati.

Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Kudus, hakim sudah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya pertimbangan yang terbaik bagi anak dan pertimbangan dari pihak Bapas juga serta hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang di tuntutan oleh Jaksa.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan pidana pada kasus yang diteliti

Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum mengenai peradilan pidana terhadap kasus yang diteliti terdapat dari pihak Kepolisian dan Bapas. Sedangkan pada tingkat Kejaksaan dan Pengadilan tidak ditemukan hambatan didalamnya. Hambatan dari Pihak Kepolisian dan Bapas adalah sebagai berikut:

a. Dari Pihak Kepolisian

Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian adalah sulitnya berinteraksi dengan Anak maupun Anak Korban. Selain itu adanya berkas perkara anak yang dikembalikan oleh Kejaksaan dimana Bukti Acara Pemeriksaan Anak yang ditanda tangani oleh saudara Anak bukan orang tua Anak. Selain dari hal tersebut sempitnya ruangan yang ada di Kanit PPA Polres Kudus.

b. Dari Pihak Bapas

Kendala yang dihadapi oleh Bapas adalah jarak tempuh yang di gunakan

untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, dalam melakukan penelitian di Lapangan Bapas harus bertanya-tanya mencari informasi mengenai Anak Pelaku dan Anak Korban serta orang terkait yang dianggap perlu yang dapat memberikan informasi. Tentu dalam hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak setelah adanya permintaan dari Kepolisian maka Bapas harus membuat laporan dalam waktu 3x24 jam. Selain itu kurangnya petugas pembimbing kemasyarakatan anak di Bapas Pati dan masyarakat yang pada saat adanya peninjauan lapangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak belum mengetahui mengenai lembaga Bapas itu apa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Kepala Polisi Resort Kudus perihal ruangan PPA yang ada di Polres Kudus harusnya diperluas, agar kenyamanan dalam proses peradilan pidana terhadap anak lebih nyaman. Dimana harusnya ada ruangan untuk tempat penyelidikan dan penyidikan tersendiri serta ruang untuk diversifikasi sendiri.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati untuk menambah jumlah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Anak yang ada di Bapas Pati mengingat cakupan wilayah penelitian oleh Bapas sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim Nasution, 1972, "*Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*", Percetakan Negara RI, Jakarta.

Liza Agnesta Kresna, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, 1991, "*Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*", Alumni, Bandung.

Tiena Masriani Yuliesna, 2008, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati Suetedjo dan Mulani, 2013, "*Hukum Pidana Anak*", Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Kudus, "*Daftar
Perkara Pidana Anak*",
<http://sipp.pn-kudus.go.id/>,
Februari 2018